

Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024

Rosya Putri Afidah

Universitas Brawijaya, Indonesia

*rosyaafidah@student.ub.id

Abstract

Financial statement fraud remains a persistent threat to capital market integrity in Indonesia, and the construction sector is especially exposed because percentage-of-completion revenue recognition, long-term contracts, and high transaction values make reported earnings heavily dependent on managerial estimates. This study examines whether corporate social responsibility (CSR) disclosure and corporate governance mechanisms constrain financial statement fraud in Indonesian construction firms. Drawing on agency theory, the study tests the effects of CSR disclosure, institutional ownership, managerial ownership, board of commissioners size, and board of commissioners meeting frequency on the likelihood of fraudulent financial reporting. Using purposive sampling, 21 construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2024 were selected, yielding 84 firm-year observations from audited annual and sustainability reports. Financial statement fraud is proxied by the Fraud Score Model (F-Score) of Dechow, Ge, Larson, and Sloan (2011), which combines accrual quality and financial performance, while CSR disclosure is measured through a Global Reporting Initiative-based index. Data were analysed using panel data regression in EViews 12; Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests identified the random effect model as the appropriate estimator. The results show that institutional ownership ($\beta = -0.329$; $p = 0.0002$) and board of commissioners size ($\beta = -0.312$; $p = 0.0007$) significantly reduce financial statement fraud, whereas CSR disclosure, managerial ownership, and board meeting frequency exert no significant effect. The model explains 68.50% of the variation in F-Score.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Financial Statement Fraud, Institutional Ownership.*

Abstrak

Kecurangan laporan keuangan masih menjadi ancaman serius bagi integritas pasar modal Indonesia, dan sektor konstruksi tergolong sangat rentan karena penggunaan metode pengakuan pendapatan berbasis persentase penyelesaian, kontrak jangka panjang, serta nilai transaksi yang besar menyebabkan laba yang dilaporkan sangat bergantung pada estimasi manajemen. Penelitian ini menganalisis apakah pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) dan mekanisme tata kelola perusahaan mampu menekan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan konstruksi di Indonesia. Berlandaskan teori keagenan, penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi

rapat dewan komisaris terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Melalui metode *purposive sampling* diperoleh 21 perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2021–2024 dengan 84 observasi perusahaan-tahun yang bersumber dari laporan tahunan audit dan laporan keberlanjutan. Kecurangan laporan keuangan diproksikan dengan *Fraud Score Model* (F-Score) dari Dechow, Ge, Larson, dan Sloan (2011) yang mengombinasikan kualitas akrual dan kinerja keuangan, sedangkan pengungkapan CSR diukur menggunakan indeks pengungkapan berbasis *Global Reporting Initiative*. Data dianalisis dengan regresi data panel menggunakan EViews 12, dan uji Chow, Hausman, serta *Lagrange Multiplier* menetapkan *random effect model* sebagai estimator yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional ($\beta = -0,329$; $p = 0,0002$) dan ukuran dewan komisaris ($\beta = -0,312$; $p = 0,0007$) berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan pengungkapan CSR, kepemilikan manajerial, dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. Model penelitian menjelaskan 68,50% variasi F-Score.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Kecurangan Laporan Keuangan, Kepemilikan Institusional.

Pendahuluan

Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) merupakan tindakan manipulasi informasi akuntansi yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan dan pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga merugikan investor, kreditur, dan regulator, serta menggerus stabilitas pasar modal melalui penurunan kepercayaan publik, kekeliruan pengambilan keputusan investasi, dan kerusakan reputasi korporasi. Berbeda dengan bentuk kecurangan lain yang bersifat transaksional, kecurangan laporan keuangan bersumber langsung dari kewenangan diskresioner manajemen atas pilihan kebijakan akuntansi, estimasi, dan waktu pengakuan, sehingga sulit dideteksi melalui pengendalian transaksional semata.

Meskipun berbagai mekanisme pengawasan telah diterapkan, kasus kecurangan laporan keuangan masih berulang pada perusahaan publik di Indonesia. Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2019 memperlihatkan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai standar akuntansi sehingga berujung pada sanksi regulator, penurunan harga saham, dan kerusakan reputasi. Pola serupa terjadi pada PT Hanson International Tbk terkait pengakuan pendapatan atas penjualan kavling tanpa dokumen pendukung yang memadai, serta pada PT Indofarma Tbk yang mengalami penyimpangan pengelolaan keuangan akibat lemahnya pengendalian internal dan tata kelola. Kasus eFishery pada 2024 menegaskan bahwa manipulasi pelaporan keuangan tetap menjadi ancaman terhadap kepercayaan publik dan relasi bisnis, bahkan pada entitas yang berada di luar kerangka pengawasan pasar modal konvensional.

Survei Fraud Indonesia 2025 yang diterbitkan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia Chapter menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan memiliki frekuensi kejadian paling rendah di antara tiga bentuk *occupational fraud*, yakni 12,2%, dibandingkan korupsi (47,6%) dan

penyalahgunaan aset (40,2%). Namun demikian, rendahnya frekuensi tersebut tidak berbanding lurus dengan besaran dampaknya: kecurangan laporan keuangan justru menimbulkan kerugian finansial per kasus yang paling besar, dengan 23,74% kasus menyebabkan kerugian antara Rp1 miliar hingga Rp50 miliar, sementara 51% pelaku kecurangan laporan keuangan berasal dari manajemen tingkat atas yang memegang kewenangan penyusunan laporan keuangan. Konfigurasi ini menunjukkan persoalan struktural: pelaku kecurangan justru berada pada posisi yang seharusnya menjadi objek pengawasan, sehingga efektivitas mekanisme pengendalian korporasi menjadi determinan kritis.

Sektor konstruksi merupakan konteks yang secara khusus relevan untuk menguji persoalan tersebut. Data ACFE Indonesia Chapter (2025) menempatkan sektor konstruksi pada peringkat kedua dari 16 industri dengan tingkat risiko fraud sebesar 14%. Kerentanan ini bersumber dari karakteristik operasional sektor yang berbasis proyek, kontrak jangka panjang, nilai transaksi besar, serta penggunaan metode pengakuan pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian (*percentage of completion*). Metode tersebut menempatkan estimasi progres proyek, taksiran biaya penyelesaian, dan perlakuan atas perubahan kontrak sebagai basis pengakuan laba, sehingga menciptakan ruang diskresi yang luas bagi manajemen untuk melakukan manipulasi pendapatan, penggeseran biaya, maupun rekayasa laba guna memenuhi target kinerja. Ketergantungan sektor ini pada pembiayaan eksternal dan kontrak pemerintah menambah tekanan untuk mempertahankan stabilitas kinerja yang dilaporkan, terutama pada periode 2021–2024 yang mencakup tekanan pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan ekonomi nasional.

Dalam perspektif teori keagenan, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian menciptakan konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen menguasai informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak eksternal sehingga terjadi asimetri informasi yang membuka peluang perilaku oportunistik, termasuk manipulasi laporan keuangan. Kerangka ini menempatkan dua kelompok mekanisme sebagai penyeimbang. Pertama, mekanisme non-keuangan berupa pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang secara konseptual memperluas arus informasi kepada pemangku kepentingan dan memperkuat pengawasan eksternal. Kedua, mekanisme tata kelola perusahaan yang secara langsung mengatur struktur insentif dan kapasitas pengawasan, meliputi struktur kepemilikan serta organ pengawas perusahaan.

Bukti empiris mengenai efektivitas kedua kelompok mekanisme tersebut masih terbelah. Pada aspek CSR, Putri (2025) menemukan pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti peningkatan pengungkapan menurunkan probabilitas fraud. Sebaliknya, Fatul Lathiifah dan Fuad (2024) justru menemukan pengaruh positif, sementara Prior, Surroca, dan Tribó (2008) menunjukkan bahwa manajer yang melakukan manajemen laba cenderung meningkatkan aktivitas CSR sebagai strategi perlindungan reputasi. Pola serupa terjadi pada mekanisme tata kelola. Kusuma dan Fitriani (2020) menunjukkan kepemilikan institusional menekan kecurangan laporan keuangan, sedangkan

Satata, Pamungkas, Sumaryati, dan Minarso (2024) menemukan pengaruh yang tidak signifikan ketika pengawasan investor institusional bersifat pasif. Sudarman, Aniqotunnafiah, dan Masruri (2019) melaporkan pengaruh negatif frekuensi rapat dewan komisaris terhadap fraud, sementara Ebaid (2023) menunjukkan bahwa frekuensi rapat tidak efektif apabila hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut substantif.

Inkonsistensi tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang belum terselesaikan pada tiga aspek. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menguji CSR dan mekanisme tata kelola secara terpisah, sehingga tidak dapat memperbandingkan kekuatan relatif keduanya dalam satu model empiris. Padahal, apabila CSR dan tata kelola sama-sama berfungsi sebagai mekanisme pengurang asimetri informasi, pengujian simultan diperlukan untuk mengetahui mekanisme mana yang benar-benar mengikat. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan sampel lintas sektor atau sektor manufaktur, sehingga karakteristik risiko spesifik sektor konstruksi khususnya diskresi akrual yang melekat pada metode *percentage of completion* belum terakomodasi. Ketiga, sebagian penelitian di Indonesia mengukur kecurangan menggunakan model berbasis indikator tunggal seperti Beneish M-Score yang berfokus pada manipulasi laba, sehingga kurang sensitif menangkap kecurangan yang bersumber dari kombinasi kualitas akrual dan tekanan kinerja.

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada tiga aspek tersebut. Secara model, penelitian ini mengintegrasikan pengungkapan CSR bersama empat mekanisme tata kelola kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris dalam satu persamaan regresi data panel, sehingga memungkinkan penilaian komparatif atas kekuatan penjelas masing-masing mekanisme. Secara konteks, penelitian ini memfokuskan pengujian pada sektor konstruksi yang secara empiris berisiko tinggi namun relatif jarang diteliti. Secara pengukuran, penelitian ini menggunakan Fraud Score Model (F-Score) yang dikembangkan Dechow, Ge, Larson, dan Sloan (2011), yang menggabungkan kualitas akrual (RSST accrual) dan kinerja keuangan sehingga lebih komprehensif dibandingkan model berbasis rasio tunggal dan lebih sesuai dengan karakteristik akrual sektor konstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dan mekanisme tata kelola perusahaan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa pengujian batas keberlakuan teori keagenan pada konteks sektor dengan intensitas akrual tinggi, serta kontribusi praktis bagi manajemen, investor, dan regulator dalam memprioritaskan mekanisme pengawasan yang secara empiris terbukti efektif.

Landasan Teori

A. Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikembangkan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumber daya kepada agen. Pemisahan fungsi kepemilikan dan pengendalian menimbulkan konflik kepentingan karena kedua pihak memiliki fungsi utilitas yang berbeda, diperkuat oleh asimetri informasi yang menguntungkan agen. Fama dan Jensen (1983) memperluas kerangka ini dengan membedakan fungsi manajemen keputusan (*decision management*) yang dijalankan manajemen dari fungsi pengendalian keputusan (*decision control*) yang dijalankan organ pengawas. Pemisahan kedua fungsi tersebut menjadi dasar teoretis bagi keberadaan dewan komisaris dan pemegang saham pengendali sebagai mekanisme pembatas diskresi manajemen.

Dalam konteks pelaporan keuangan, asimetri informasi bermanifestasi pada penguasaan manajemen atas substansi transaksi, dasar estimasi, dan pilihan kebijakan akuntansi yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi pihak eksternal. Kondisi ini melahirkan biaya keagenan berupa biaya pengawasan (*monitoring costs*) yang harus ditanggung prinsipal. Kerangka ini memberikan dua implikasi yang diuji dalam penelitian ini: mekanisme yang meningkatkan kapasitas dan insentif pengawasan diharapkan menurunkan kecurangan laporan keuangan, sementara mekanisme yang hanya menambah volume informasi tanpa memperkuat verifikasi tidak selalu menghasilkan efek yang sama.

B. Kecurangan Laporan Keuangan dan Pengukurannya

Kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai salah saji atau penghilangan jumlah maupun pengungkapan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menyesatkan pengguna laporan keuangan. Karena tindakan ini umumnya dilakukan pihak yang memiliki kewenangan atas proses penyusunan laporan, deteksinya menuntut instrumen yang mampu menangkap sinyal tidak langsung dari pola akrual dan kinerja. Mohamed dan Handley-Schachler (2015) menegaskan bahwa pengendalian kecurangan laporan keuangan merupakan tanggung jawab berlapis yang melibatkan manajemen, organ pengawas, dan auditor.

Dechow, Ge, Larson, dan Sloan (2011) mengembangkan Fraud Score Model (F-Score) berbasis analisis 2.190 *Accounting and Auditing Enforcement Releases* yang diterbitkan *Securities and Exchange Commission*. Model ini menggabungkan dua dimensi, yaitu kualitas akrual yang diukur melalui RSST accrual dan kinerja keuangan yang diukur melalui perubahan piutang, persediaan, penjualan tunai, serta laba. Kombinasi tersebut menjadikan F-Score lebih sensitif dibandingkan model berbasis indikator tunggal seperti Beneish M-Score yang hanya berfokus pada manipulasi laba. Husnurrosyidah dan Fatihah (2022) secara komparatif menunjukkan keunggulan F-Score dalam konteks perusahaan Indonesia, sementara Nurcahyono, Hanum, Kristiana, dan Pamungkas (2021) memvalidasi penerapannya pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Karakteristik ini relevan bagi sektor

konstruksi yang tingkat ketergantungannya pada akrual dan estimasi tergolong tinggi.

C. Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dan Kecurangan Laporan Keuangan

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan di luar pemegang saham. Dalam kerangka teori keagenan, perluasan pengungkapan memperkecil ruang informasi yang dikuasai secara eksklusif oleh manajemen dan memperbesar jumlah pihak yang mengamati perilaku perusahaan, sehingga biaya reputasional atas perilaku oportunistik meningkat. Perusahaan dengan komitmen sosial yang kuat juga cenderung memiliki budaya etis dan sistem pengendalian internal yang lebih matang, yang secara tidak langsung membatasi peluang manipulasi pelaporan.

Argumen tandingan menyatakan bahwa pengungkapan CSR dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi. Prior, Surroca, dan Tribó (2008) menemukan bahwa manajer yang melakukan manajemen laba justru meningkatkan aktivitas CSR untuk membangun dukungan pemangku kepentingan dan meredam pengawasan, sedangkan Rostami dan Rezaei (2022) menunjukkan bahwa penguatan citra tidak identik dengan penguatan pengendalian. Meskipun demikian, hipotesis penelitian dirumuskan mengikuti prediksi teori keagenan bahwa perluasan pengungkapan menurunkan asimetri informasi.

H1: Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan Institusional dan Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional merepresentasikan proporsi saham yang dikuasai investor institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Shleifer dan Vishny (1986) menjelaskan bahwa kehadiran pemegang saham besar mengatasi masalah free rider dalam pengawasan: ketika kepemilikan terkonsentrasi, manfaat pengawasan yang diperoleh pemegang saham besar melampaui biayanya, sehingga insentif untuk memantau manajemen menjadi rasional secara ekonomi. Investor institusional juga memiliki keunggulan kapasitas berupa sumber daya analitis, akses langsung kepada manajemen, dan kemampuan menggunakan hak suara secara terkoordinasi.

Kusuma dan Fitriani (2020) serta Soesanto, Noviyanti, dan Purnamasari (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional menurunkan probabilitas kecurangan pelaporan keuangan, sementara Indiraswari, Subroto, Rosidi, dan Subekti (2025) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola berbasis kepemilikan meningkatkan kualitas pelaporan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kepemilikan Manajerial dan Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajemen perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan hipotesis penyelarasan

kepentingan (*convergence of interest*), yaitu bahwa kepemilikan saham oleh manajemen menjadikan manajer menanggung sebagian konsekuensi ekonomi dari keputusannya, sehingga insentif untuk bertindak oportunistik berkurang. Manipulasi laporan keuangan yang terungkap akan menurunkan nilai kepemilikan manajer itu sendiri, sehingga menciptakan disinsentif internal.

Efektivitas mekanisme ini bergantung pada besaran kepemilikan. Ketika proporsi kepemilikan manajerial rendah, kerugian yang ditanggung manajer atas tindakan oportunistik menjadi tidak material dibandingkan manfaat pribadi yang diperolehnya, sehingga efek penyelarasan melemah. Nurcahyono et al. (2021) dan Kusuma dan Fitriani (2020) melaporkan pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap kecurangan pelaporan keuangan, sedangkan Ihsanti dan Cheisviyanny (2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Ukuran Dewan Komisaris dan Kecurangan Laporan Keuangan

Dalam sistem tata kelola dua tingkat (*two-tier board*) yang berlaku di Indonesia, dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Dalam kerangka Fama dan Jensen (1983), dewan komisaris merupakan pelaksana fungsi pengendalian keputusan yang terpisah dari manajemen keputusan. Jumlah anggota dewan komisaris mencerminkan kapasitas pengawasan perusahaan: dewan yang lebih besar memungkinkan pembagian beban pengawasan, keragaman keahlian termasuk kompetensi akuntansi dan keuangan, serta jangkauan penelaahan yang lebih luas atas area berisiko tinggi.

Kurnia, Diah, Arum, dan Wijaya (2024) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, dan Bunga, Lejab, Rahayu, dan Emarawati (2024) melaporkan temuan yang sejalan pada konteks perusahaan Indonesia. Sebaliknya, Ebaid (2023) menemukan hubungan positif pada pasar Saudi, yang dikaitkan dengan potensi menurunnya efektivitas koordinasi pada dewan berukuran sangat besar.

H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Kecurangan Laporan Keuangan

Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan proksi intensitas aktivitas pengawasan. Vafeas (1999) mengemukakan bahwa waktu pertemuan merupakan sumber daya langka bagi dewan, sehingga peningkatan frekuensi rapat mencerminkan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih besar. Rapat yang lebih sering memungkinkan dewan komisaris memperoleh informasi yang lebih mutakhir, mengevaluasi kinerja manajemen secara berkala, serta mendeteksi indikasi penyimpangan pelaporan lebih dini.

Namun, frekuensi rapat merupakan ukuran kuantitatif yang tidak serta-merta mencerminkan kualitas pembahasan. Kaituko, Githaiga, dan Chelogoi (2023) menemukan pengaruh negatif frekuensi rapat dewan terhadap probabilitas

kecurangan laporan keuangan, sedangkan Ebaid (2023) dan McLaughlin, Armstrong, Moustafa, dan Elamer (2021) menunjukkan bahwa intensitas pertemuan tidak berpengaruh apabila agenda rapat bersifat administratif dan tidak disertai tindak lanjut. Vafeas (1999) juga mencatat bahwa peningkatan frekuensi rapat dapat merupakan respons reaktif terhadap penurunan kinerja, bukan tindakan pencegahan.

H5: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-eksplanatori untuk menguji pengaruh pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan (Creswell, 2014). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi atas laporan tahunan auditan, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan perusahaan, yang diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>) serta situs resmi masing-masing perusahaan sampel (Sekaran & Bougie, 2016). Periode pengamatan 2021–2024 dipilih karena mencakup fase tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 hingga fase pemulihan, sehingga menghadirkan variasi tekanan kinerja yang cukup lebar untuk menguji efektivitas mekanisme pengawasan pada kondisi yang berbeda, sekaligus merepresentasikan data terkini yang tersedia lengkap saat penelitian dilakukan.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2021–2024, berjumlah 29 perusahaan. Sektor ini dipilih karena menempati peringkat kedua dari 16 industri dengan tingkat risiko fraud tertinggi menurut Survei Fraud Indonesia 2025 (ACFE Indonesia Chapter, 2025). Sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode penelitian serta menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan pertanggungjawaban sosial secara lengkap. Sebanyak 8 perusahaan tereliminasi karena tidak memenuhi kriteria kelengkapan pelaporan, sehingga diperoleh 21 perusahaan dengan 84 observasi perusahaan-tahun yang membentuk panel seimbang (*balanced panel*).

Variabel terikat, yaitu kecurangan laporan keuangan (FSCORE), diproksikan menggunakan *Fraud Score Model* dari Dechow, Ge, Larson, dan Sloan (2011) yang dirumuskan sebagai penjumlahan kualitas akrual dan kinerja keuangan. Kualitas akrual diukur melalui *RSST accrual*, yakni jumlah perubahan modal kerja, perubahan akrual operasi non-lancar, dan perubahan akrual keuangan dibagi rata-rata total aset; sementara kinerja keuangan merupakan penjumlahan perubahan piutang, persediaan, penjualan tunai, dan laba yang masing-masing telah diskalakan. Model ini dipilih karena mengombinasikan dimensi akrual dan tekanan kinerja secara simultan sehingga lebih komprehensif dibandingkan model berbasis indikator tunggal, dan karenanya lebih sesuai bagi sektor konstruksi yang bertumpu pada estimasi progres proyek. Nilai F-Score yang lebih tinggi menunjukkan indikasi

salah saji material yang lebih besar, dengan nilai di atas 1 secara konvensional menandakan indikasi kecurangan.

Variabel bebas terdiri atas lima proksi. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial (CSR) diukur menggunakan indeks pengungkapan, yaitu rasio jumlah item yang diungkapkan perusahaan terhadap total item yang dipersyaratkan pedoman *Global Reporting Initiative* (Haniffa & Cooke, 2005). Kepemilikan institusional (KI) dan kepemilikan manajerial (KM) masing-masing diukur sebagai persentase saham yang dimiliki investor institusional dan pihak manajemen terhadap total saham beredar (Shleifer & Vishny, 1986; Jensen & Meckling, 1976). Ukuran dewan komisaris (JK) diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris pada akhir tahun buku (Fama & Jensen, 1983), sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris (JRDK) diukur berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan selama satu tahun buku (Vafeas, 1999). Seluruh variabel diukur pada skala rasio.

Hipotesis diuji menggunakan regresi data panel dengan persamaan $FSCORE_{it} = \alpha + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 KI_{it} + \beta_3 KM_{it} + \beta_4 JK_{it} + \beta_5 JRDK_{it} + \varepsilon_{it}$, dengan *i* sebagai unit *cross section* dan *t* sebagai dimensi *time series*. Pengolahan data dilakukan menggunakan EViews 12 melalui tahapan analisis statistik deskriptif; pemilihan model estimasi di antara *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect model* melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier pendekatan Breusch–Pagan; pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas Jarque–Bera, uji multikolinearitas melalui *centered variance inflation factor*, uji heteroskedastisitas Glejser, dan uji autokorelasi Durbin–Watson (Ghozali, 2021); serta pengujian hipotesis melalui uji *t* parsial, uji *F* simultan, dan koefisien determinasi. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien sesuai prediksi teoretis.

Hasil dan Pembahasan

A. Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan atas 84 observasi perusahaan-tahun dari 21 perusahaan sektor konstruksi selama 2021–2024. Karakteristik masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
FSCORE	84	-2,830	3,150	-0,111	1,095
CSR	84	0,130	0,900	0,523	0,211
KI	84	0,000	0,994	0,632	0,303
KM	84	0,000	0,881	0,168	0,273
JK	84	2,000	9,000	4,428	1,851
JRDK	84	4,000	21,000	9,005	4,495

Sumber: Output EViews 12, data diolah penulis (2026)

Variabel FSCORE memiliki rata-rata -0,111 dengan rentang -2,830 hingga 3,150. Nilai rata-rata yang berada jauh di bawah ambang batas 1 menunjukkan

bahwa secara agregat indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sampel tergolong rendah. Namun, simpangan baku sebesar 1,095 yang melampaui nilai absolut rata-rata mengindikasikan dispersi antarperusahaan yang lebar; sebagian perusahaan berada pada wilayah nilai positif tinggi yang menandakan indikasi salah saji, sementara sebagian lain berada pada nilai negatif yang mencerminkan pola akrual konservatif. Heterogenitas inilah yang menjadi variasi utama yang dijelaskan model penelitian.

Variabel CSR memiliki rata-rata 0,523, yang berarti perusahaan sampel rata-rata mengungkapkan 52,3% item pengungkapan yang dipersyaratkan pedoman GRI. Rentang 0,130 hingga 0,900 menunjukkan disparitas praktik pengungkapan yang tajam antarperusahaan dalam satu sektor yang sama. Struktur kepemilikan menunjukkan dominasi investor institusional dengan rata-rata KI sebesar 0,632, jauh melampaui rata-rata KM sebesar 0,168. Nilai minimum nol pada kedua variabel menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang sama sekali tidak memiliki kepemilikan institusional maupun manajerial. Rendahnya kepemilikan manajerial menjadi catatan penting dalam menginterpretasikan hasil pengujian H3.

Pada aspek organ pengawas, rata-rata jumlah anggota dewan komisaris adalah 4,428 orang dengan rentang 2 hingga 9 orang, sedangkan rata-rata frekuensi rapat dewan komisaris adalah 9,005 kali per tahun dengan rentang 4 hingga 21 kali. Perlu dicatat bahwa Pasal 31 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 mewajibkan dewan komisaris mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam dua bulan, atau setara enam kali dalam satu tahun. Dengan demikian, nilai minimum sebesar 4 kali menunjukkan bahwa terdapat observasi yang berada di bawah ambang kepatuhan regulasi, sementara nilai maksimum 21 kali jauh melampaui ketentuan minimum tersebut. Rentang yang lebar ini mencakup baik variasi kepatuhan maupun variasi intensitas pengawasan antarperusahaan.

B. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model estimasi dilakukan melalui tiga pengujian berjenjang yang hasilnya diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Statistik Uji	Nilai	Prob.	Keputusan
Uji Chow (CEM vs FEM)	Cross-section F	2,393271	0,0051	FEM
	Cross-section Chi-square	50,544949	0,0002	FEM
Uji Hausman (FEM vs REM)	Cross-section random	3,492090	0,6246	REM
Uji Lagrange Multiplier (CEM vs REM)	Breusch–Pagan (cross-section)	7,158403	0,0075	REM
	Breusch–Pagan (both)	8,941148	0,0028	REM

Sumber: Output EViews 12, data diolah penulis (2026)

Uji Chow menghasilkan probabilitas Cross-section F sebesar 0,0051 dan Cross-section Chi-square sebesar 0,0002, keduanya lebih kecil dari 0,05, sehingga fixed effect model lebih tepat dibandingkan common effect model. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,6246 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol yang menyatakan efek individual tidak berkorelasi dengan variabel penjelas tidak ditolak dan random effect model lebih tepat dibandingkan fixed effect model. Uji Lagrange Multiplier menghasilkan probabilitas Breusch–Pagan sebesar 0,0075 untuk efek cross-section dan 0,0028 untuk efek gabungan, yang menegaskan keberadaan efek individual sehingga random effect model lebih tepat dibandingkan common effect model. Berdasarkan konvergensi ketiga pengujian tersebut, random effect model ditetapkan sebagai model estimasi akhir. Pemilihan REM juga menguntungkan secara metodologis karena mempertahankan efisiensi estimasi tanpa mengorbankan derajat kebebasan pada panel dengan dimensi waktu yang relatif pendek ($T = 4$).

C. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan estimasi yang dihasilkan bersifat valid dan tidak bias. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Indikator	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas	Jarque–Bera (Prob.)	4,318622 (0,115405)	Prob. > 0,05	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	Centered VIF tertinggi (JRDK)	2,361508	VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Glejser Obs*R- squared (Prob.)	8,563736 (0,1278)	Prob. > 0,05	Homoskedastisitas terpenuhi
Autokorelasi	Durbin– Watson	1,970523	$d_u < DW$ < $4 - d_u$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Output EViews 12, data diolah penulis (2026)

Uji Jarque–Bera menghasilkan nilai 4,318622 dengan probabilitas 0,115405 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Nilai centered VIF seluruh variabel bebas berada pada rentang 1,887 hingga 2,362, jauh di bawah ambang batas 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas yang mengganggu interpretasi koefisien parsial. Uji Glejser menghasilkan probabilitas Chi-square sebesar 0,1278 yang lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Uji autokorelasi menghasilkan statistik Durbin–Watson sebesar 1,970523, yang berada di antara batas atas d_u ($\approx 1,774$) dan $4 - d_u$ ($\approx 2,226$) pada $n = 84$ dan $k = 5$, sehingga tidak terdapat indikasi autokorelasi.

Statistik Durbin–Watson pada output estimasi akhir sebesar 2,210384 juga berada dalam rentang penerimaan yang sama. Dengan terpenuhinya keempat asumsi tersebut, estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara valid.

D. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Hasil estimasi random effect model disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Random Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Ket.
C (konstanta)	0,085541	0,103565	0,825964	0,4113	–
CSR	–0,136008	0,091401	–1,488040	0,1408	Tidak signifikan
KI	–0,328746	0,084902	–3,872064	0,0002	Signifikan***
KM	–0,049220	0,078084	–0,630346	0,5303	Tidak signifikan
JK	–0,311714	0,088724	–3,513302	0,0007	Signifikan***
JRDK	–0,159473	0,096735	–1,648562	0,1033	Tidak signifikan
R-squared	0,684974	Adjusted R-squared	0,664780		
F-statistic	33,91978	Prob(F-statistic)	0,000000		
S.E. of regression	0,519724	Durbin–Watson stat	2,210384		

Sumber: Output EViews 12, data diolah penulis (2026). *** signifikan pada $\alpha = 1\%$; nilai t-tabel pada $df = 78$ dan $\alpha = 5\%$ adalah 1,9908.

Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: $FSCORE = 0,0855 - 0,1360 CSR - 0,3287 KI - 0,0492 KM - 0,3117 JK - 0,1595 JRDK + \varepsilon$

Uji F menghasilkan nilai F-statistic sebesar 33,91978 dengan probabilitas 0,000000, sehingga kelima variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dan model dinyatakan layak (goodness of fit terpenuhi). Nilai R-squared sebesar 0,684974 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 68,50% variasi F-Score, sedangkan 31,50% sisanya dijelaskan faktor di luar model seperti kualitas audit eksternal, independensi dewan komisaris, efektivitas komite audit, dan tekanan keuangan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,664780 menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model tetap kuat setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi.

Seluruh koefisien variabel bebas bertanda negatif sesuai prediksi teoretis, namun hanya dua yang signifikan secara statistik. Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Arah Koefisien	Prob.	Simpulan
H1	CSR berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan	Negatif	0,1408	Ditolak
H2	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan	Negatif	0,0002	Diterima
H3	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan	Negatif	0,5303	Ditolak
H4	Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan	Negatif	0,0007	Diterima
H5	Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan	Negatif	0,1033	Ditolak

Sumber: Data diolah penulis (2026)

E. Pengaruh Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial memiliki koefisien $-0,136008$ dengan probabilitas $0,1408$ yang lebih besar dari $0,05$, sehingga H1 ditolak. Arah koefisien memang negatif sesuai prediksi teoretis, tetapi besarannya tidak berbeda secara statistik dari nol. Temuan ini menunjukkan bahwa luasnya pengungkapan CSR belum mampu menjadi mekanisme yang efektif dalam membatasi manipulasi pelaporan keuangan pada perusahaan sektor konstruksi.

Dalam kerangka teori keagenan, penambahan informasi seharusnya menurunkan asimetri informasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa prediksi tersebut tidak berlaku secara otomatis, karena efektivitas pengungkapan bergantung pada verifiabilitasnya. Pengungkapan CSR bersifat sukarela, sebagian besar tidak diaudit secara independen, dan berbasis narasi kualitatif, sehingga menambah volume informasi tanpa menambah kapasitas verifikasi pihak eksternal atas substansi pelaporan keuangan. Dengan kata lain, informasi CSR dan informasi akrual berada pada domain yang berbeda; perluasan yang pertama tidak dengan sendirinya mempersempit ruang diskresi pada yang kedua.

Penjelasan alternatif mengacu pada perspektif legitimasi. Prior, Surroca, dan Tribó (2008) menunjukkan bahwa manajer yang melakukan manajemen laba justru meningkatkan aktivitas CSR untuk membangun dukungan pemangku kepentingan dan meredam pengawasan. Dalam konteks ini, CSR berfungsi sebagai penyangga reputasional yang justru dapat berjalan beriringan dengan praktik pelaporan yang agresif, sehingga efek bersihnya menjadi tidak signifikan. Temuan ini konsisten dengan Susetyo dan Laily (2025) serta Handoko dan Prastiwi (2022) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR di Indonesia masih cenderung bersifat

simbolis dan berorientasi pada pembentukan citra dibandingkan perbaikan kualitas pelaporan keuangan. Disparitas indeks pengungkapan yang lebar pada sampel penelitian ini, yakni 0,130 hingga 0,900, memperkuat dugaan bahwa praktik pengungkapan lebih mencerminkan strategi komunikasi perusahaan daripada kualitas tata kelola yang mendasarinya.

F. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan institusional memiliki koefisien $-0,328746$ dengan probabilitas $0,0002$ yang lebih kecil dari $0,01$, sehingga H_2 diterima. Nilai t-statistic sebesar $-3,872064$ melampaui t-tabel $1,9908$ dalam nilai absolut. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan proporsi kepemilikan institusional menurunkan indikasi kecurangan laporan keuangan. Variabel ini memiliki koefisien absolut terbesar di antara seluruh variabel bebas, yang menempatkannya sebagai mekanisme pengawasan paling kuat dalam model.

Temuan ini mendukung argumen Shleifer dan Vishny (1986) mengenai peran pemegang saham besar dalam mengatasi masalah free rider dalam pengawasan. Ketika kepemilikan terkonsentrasi pada investor institusional, manfaat pengawasan yang diperoleh melampaui biayanya sehingga aktivitas monitoring menjadi rasional secara ekonomi. Investor institusional juga memiliki keunggulan kapasitas analitis untuk mengevaluasi kewajaran estimasi akrual, akses langsung kepada manajemen melalui forum investor, serta kemampuan mendisiplinkan manajemen melalui hak suara maupun ancaman divestasi. Rata-rata kepemilikan institusional yang tinggi pada sampel, yakni $63,2\%$, menunjukkan bahwa mekanisme ini beroperasi pada tingkat konsentrasi yang memadai untuk menghasilkan efek disipliner.

Hasil ini konsisten dengan Kusuma dan Fitriani (2020), Soesanto, Noviyanti, dan Purnamasari (2024), serta Indiraswari, Subroto, Rosidi, dan Subekti (2025). Temuan ini juga memberikan konteks bagi hasil Satata, Pamungkas, Sumaryati, dan Minarso (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan: perbedaan tersebut kemungkinan bersumber dari tingkat konsentrasi kepemilikan dan tipologi investor institusional yang berbeda antarsampel, karena efektivitas pengawasan bergantung pada apakah investor institusional bersifat aktif atau pasif.

G. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial memiliki koefisien $-0,049220$ dengan probabilitas $0,5303$, sehingga H_3 ditolak. Variabel ini memiliki koefisien absolut terkecil sekaligus probabilitas tertinggi dalam model, yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen praktis tidak memiliki daya jelas terhadap variasi indikasi kecurangan laporan keuangan.

Statistik deskriptif membantu menjelaskan temuan ini. Rata-rata kepemilikan manajerial pada sampel hanya $16,8\%$ dengan nilai minimum nol, jauh lebih rendah dibandingkan kepemilikan institusional sebesar $63,2\%$. Pada tingkat kepemilikan yang rendah, kerugian ekonomi yang ditanggung manajer akibat penurunan nilai saham apabila kecurangan terungkap menjadi tidak material dibandingkan manfaat

pribadi berupa pencapaian target kinerja, bonus, maupun keamanan posisi. Mekanisme penyalarsan kepentingan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) dengan demikian tidak mencapai ambang efektivitasnya. Struktur kepemilikan sektor konstruksi Indonesia yang didominasi badan usaha milik negara dan kelompok usaha keluarga turut membatasi ruang bagi kepemilikan manajerial yang material.

Temuan ini sejalan dengan Ihsanti dan Cheisviyanny (2024) yang juga tidak menemukan pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa hasil Nurcahyono et al. (2021) tidak dapat digeneralisasi secara langsung pada konteks dengan struktur kepemilikan manajerial yang tipis.

H. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Ukuran dewan komisaris memiliki koefisien $-0,311714$ dengan probabilitas $0,0007$ yang lebih kecil dari $0,01$, sehingga H_4 diterima. Nilai t-statistic sebesar $-3,513302$ melampaui t-tabel dalam nilai absolut. Koefisien negatif menunjukkan bahwa penambahan anggota dewan komisaris menurunkan indikasi kecurangan laporan keuangan.

Temuan ini mendukung kerangka Fama dan Jensen (1983) mengenai pemisahan fungsi manajemen keputusan dan pengendalian keputusan. Dewan komisaris yang lebih besar memperluas kapasitas pengawasan melalui tiga jalur: pembagian beban penelaahan sehingga cakupan pengawasan menjadi lebih luas, keragaman keahlian termasuk kompetensi akuntansi dan keuangan yang diperlukan untuk mengevaluasi kewajaran estimasi, serta pengurangan ketergantungan pada penilaian individual yang dapat dipengaruhi manajemen. Dalam konteks sektor konstruksi yang bertumpu pada estimasi progres proyek dan taksiran biaya penyelesaian, kapasitas penelaahan teknis atas dasar estimasi tersebut menjadi sangat menentukan.

Hasil ini konsisten dengan Kurnia, Diah, Arum, dan Wijaya (2024) serta Bunga, Lejab, Rahayu, dan Emarawati (2024). Temuan ini berbeda dengan Ebaid (2023) yang menemukan hubungan positif pada pasar Saudi. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan sistem tata kelola: Indonesia menganut sistem dua tingkat yang memisahkan dewan komisaris dari direksi secara struktural, sehingga penambahan anggota memperkuat fungsi pengawasan tanpa menimbulkan masalah koordinasi antara pengawas dan pelaksana sebagaimana terjadi pada sistem satu tingkat. Rentang jumlah anggota pada sampel, yakni 2 hingga 9 orang, juga masih berada dalam kisaran yang belum menimbulkan inefisiensi koordinasi.

I. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Frekuensi rapat dewan komisaris memiliki koefisien $-0,159473$ dengan probabilitas $0,1033$, sehingga H_5 ditolak. Meskipun arah koefisien negatif dan probabilitasnya merupakan yang terdekat dengan ambang signifikansi di antara

variabel yang tidak signifikan, bukti statistik belum memadai untuk menyimpulkan adanya pengaruh.

Temuan ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara ukuran kapasitas dan ukuran aktivitas. Jumlah anggota dewan komisaris merupakan proksi kapasitas struktural yang menentukan seberapa luas dan sedalam apa penelaahan dapat dilakukan, sedangkan frekuensi rapat merupakan proksi aktivitas prosedural yang tidak memuat informasi mengenai substansi pembahasan. Rapat yang diselenggarakan secara rutin dapat didominasi agenda administratif seperti persetujuan formal dan pelaporan berkala tanpa penelaahan mendalam atas asumsi akuntansi dan area berisiko tinggi. Sebaran data pada sampel memperkuat interpretasi ini: frekuensi rapat berkisar dari 4 hingga 21 kali per tahun, sehingga variasi yang teramati mencampurkan perbedaan tingkat kepatuhan terhadap ambang wajib enam kali per tahun dengan perbedaan intensitas pengawasan yang sesungguhnya. Ukuran tunggal berupa jumlah rapat karena itu tidak mampu memisahkan pengawasan substantif dari pemenuhan agenda.

Vafeas (1999) mengemukakan penjelasan tambahan bahwa peningkatan frekuensi rapat sering merupakan respons reaktif terhadap penurunan kinerja, bukan tindakan preventif. Apabila mekanisme ini berlaku, hubungan antara frekuensi rapat dan indikasi kecurangan menjadi tercampur antara efek pengawasan yang menurunkan fraud dan efek endogen ketika perusahaan bermasalah justru lebih sering menggelar rapat, sehingga efek bersihnya melemah. Temuan ini konsisten dengan Ebaid (2023) serta McLaughlin, Armstrong, Moustafa, dan Elamer (2021) yang menegaskan bahwa intensitas pertemuan organ pengawas tidak menjamin efektivitas pengawasan tanpa disertai kualitas pembahasan, independensi, kompetensi anggota, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Pola hasil penelitian ini membentuk satu benang merah yang konsisten. Dua variabel yang signifikan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris sama-sama merepresentasikan kapasitas pengawasan yang substantif, yaitu keberadaan pihak yang memiliki insentif ekonomi sekaligus kemampuan untuk menelaah kewajaran pelaporan. Sebaliknya, tiga variabel yang tidak signifikan pengungkapan CSR, kepemilikan manajerial pada tingkat rendah, dan frekuensi rapat merepresentasikan bentuk kepatuhan yang bersifat simbolis, prosedural, atau tidak mencapai ambang materialitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kualifikasi penting terhadap teori keagenan: mekanisme pengendalian keagenan tidak bekerja melalui keberadaan formalnya, melainkan melalui kapasitas dan insentif aktual pihak yang menjalankannya. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis penyalarsan kepentingan memiliki syarat batas berupa materialitas kepemilikan, dan bahwa perluasan pengungkapan hanya menurunkan asimetri informasi apabila informasi yang diungkapkan dapat diverifikasi. Secara praktis, temuan ini mengarahkan perusahaan untuk memprioritaskan penguatan komposisi dan kompetensi dewan komisaris dibandingkan peningkatan frekuensi rapat, mengarahkan investor untuk menjadikan struktur kepemilikan institusional dan kapasitas dewan komisaris sebagai indikator utama dalam menilai risiko pelaporan, serta mengarahkan regulator untuk mempertimbangkan penguatan ketentuan

mengenai kualitas dan verifikasi pengungkapan keberlanjutan, mengingat pengungkapan yang tidak diverifikasi belum menghasilkan efek disipliner terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dan empat mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan pada 21 perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 dengan 84 observasi perusahaan-tahun. Hasil estimasi *random effect* model menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan pengungkapan pertanggungjawaban sosial, kepemilikan manajerial, dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan dan mampu menjelaskan 68,50% variasi F-Score.

Pola temuan tersebut mengarah pada satu simpulan utama: efektivitas mekanisme pengendalian keagenan ditentukan oleh kapasitas dan insentif aktual pihak yang menjalankan pengawasan, bukan oleh keberadaan formal mekanisme tersebut. Kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terbukti efektif karena keduanya merepresentasikan kapasitas pengawasan yang substantif, yaitu kehadiran pihak yang memiliki insentif ekonomi memadai sekaligus kemampuan menelaah kewajaran estimasi dan akrual. Sebaliknya, pengungkapan CSR yang tidak diverifikasi secara independen, kepemilikan manajerial yang tidak mencapai ambang materialitas, dan frekuensi rapat yang bersifat prosedural belum menghasilkan efek disipliner terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. (2025). *Survei fraud Indonesia 2025*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter. Diakses dari <https://acfe-indonesia.or.id/survey-fraud-indonesia-2025/>
- Bunga, S. L., Rahayu, M., & Emarawati, J. A. (2024). Dewan komisaris, kepemilikan institusional dan pergantian auditor terhadap fraud. *IKRAITH-Ekonomika*, 7(2). <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i2>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dechow, P. M., Ge, W., Larson, C. R., & Sloan, R. G. (2011). Predicting material accounting misstatements. *Contemporary Accounting Research*, 28(1), 17–82. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x>
- Ebaid, I. E.-S. (2023). Board characteristics and the likelihood of financial statements fraud: Empirical evidence from an emerging market. *Future Business Journal*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00218-z>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>

- Fatul Lathiifah, O., & Fuad, F. (2024). CSR and financial fraud: Board gender and audit committee expertise as moderating. *Jurnal Proaksi*, 11(4), 841–856. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i4.6515>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Ed. ke-10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, B. L., & Prastiwi, A. L. P. G. (2022). Financial statement fraud detection using analysis of corporate social responsibility disclosure and annual report readability with earnings management as moderating variable. *ACM International Conference Proceeding Series*, 53–59. <https://doi.org/10.1145/3549823.3549832>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>
- Husnurrosyidah, H., & Fatihah, I. (2022). Fraud detecting using Beneish M-Score and F-Score: Which is more effective? *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v10i1.15351>
- Ihsanti, M., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit terhadap fraudulent financial statements. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(3), 216–230. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i3.24>
- Indiraswari, S. D., Subroto, B., Rosidi, R., & Subekti, I. (2025). Corporate governance and financial statement fraud: Evidence on the moderating influence of financial distress. *Problems and Perspectives in Management*, 23(2), 785–795. [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(2\).2025.57](https://doi.org/10.21511/ppm.23(2).2025.57)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaituko, L. E., Githaiga, P. N., & Chelogoi, S. K. (2023). Board structure and the likelihood of financial statement fraud. Does audit fee matter? Evidence from manufacturing firms in the East Africa Community. *Cogent Business & Management*, 10(2), 2218175. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218175>
- Kurnia, Z., Arum, E. D. P., & Wijaya, R. (2024). The influence of corporate governance on financial report fraud with company size as a moderating variable in infrastructure, utilities, and transportation companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the period 2019–2021. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 3(2), 276–290. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v3i2.962>
- Kusuma, H., & Fitriani, N. (2020). Ownership structure and the likelihood of financial reporting fraud. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 1153–1169. Diakses dari <https://www.ijicc.net/>
- Lee, N., & Kwon, K.-H. (2020). Revenue recognition on percentage of completion basis and firm value. *International Journal of Business and Society*, 21(1), 1–17. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3237.2020>

- McLaughlin, C., Armstrong, S., Moustafa, M. W., & Elamer, A. A. (2021). Audit committee diversity and corporate scandals: Evidence from the UK. *International Journal of Accounting and Information Management*, 29(5), 734–763. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-01-2021-0024>
- Mohamed, N., & Handley-Schachler, M. (2015). Roots of responsibilities to financial statement fraud control. *Procedia Economics and Finance*, 28, 46–52. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01080-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01080-1)
- Nurcahyono, N., Hanum, A. N., Kristiana, I., & Pamungkas, I. D. (2021). Predicting fraudulent financial statement risk: The testing Dechow F-Score financial sector company in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(6), 1487–1494. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090625>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/>
- Prior, D., Surroca, J., & Tribó, J. A. (2008). Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance: An International Review*, 16(3), 160–177. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00678.x>
- Putri, A. P. (2025). Audit internal sebagai variabel moderating dampak pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan stabilitas keuangan terhadap financial statement fraud. *Sibatik Journal*, 4(9). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i9.3426>
- Rostami, V., & Rezaei, L. (2022). Corporate governance and fraudulent financial reporting. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 1009–1026. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0160>
- Satata, D. P. I., Pamungkas, I. D., Sumaryati, A., & Minarso, B. (2024). The role of institutional ownership in detecting fraudulent financial reporting: Fraud heptagon model analysis. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 14(1), 37–47. <https://doi.org/10.26714/mki.14.1.2024.37-47>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. *Journal of Political Economy*, 94(3), 461–488. <https://doi.org/10.1086/261385>
- Soesanto, L., Noviyanti, S., & Purnamasari, G. D. (2024). The effect of corporate governance and whistleblowing system on the tendency of financial statement fraud. *Journal of Business and Information Systems*, 6(2). <https://doi.org/10.36067/jbis.v6i2.247>
- Sudarman, Aniqotunnafiah, & Masruri. (2019). The composition of independent board of commissioner and number of board of commissioner meeting towards fraudulence of financial report (Empirical study at public company

- listed at Indonesia Stock Exchange in 2011–2017). *International Journal of Financial Research*, 10(4), 96–107. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n4p96>
- Susetyo, D. N., & Laily, N. (2025). Pengaruh financial stability, financial target, dan corporate social responsibility terhadap financial fraud. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(1), 1–16.
- Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of Financial Economics*, 53(1), 113–142. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(99\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00018-5)